**Indonesia dan agenda G20**

**M100%-**Jakarta 06 November 2014, sejak era pemerintahan SBY, Indonesia telah menjadi salah satu anggota aktif dari forum international bernama Group Twenty (G20). Keterlibatan Indonesia dalam organisasi international tersebut diharapkan mampu memajukan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Namun jika mengevaluasi dari era pemerintahan SBY yang membawa Indonesia menjadi anggota aktif G20, maka muncul pertanyaan apakah agenda G20 baik untuk Indonesia, atau itu merupakan agenda neo liberalisme yang mengancam kesejahteraan rakyat Indonesia dan kemandirian perekonomian nasional?

Wakil menteri keuangan Mahendra Siregar menuturkan bahwa idealnya Indonesia harus terlibat aktif dalam forum G20 ini. “Australia akan menjadi tuan rumah agenda KTT G20 nanti, saya belum dapat menyimpulkan apakah Jokowi dengan pemerintahan baru Indonesia akan menjadi anggota aktif dalam forum tersebut, namun menurut saya semangat dari G20 sangat baik bagi Indonesia, yakni menjadi stimulus perekonomian Indonesia untuk menjawab tantangan dunia,” ujar Mahendra saat ditemui di SCTV Tower (06/11).

Mahendra juga menambahkan, bahwa sesungguhnya tidak hanya Indonesia yang membutuhkan agenda G20 untuk peningkatan perekonomian, tetapi G20 pun membutukan Negara berkembang seperti Indonesia sebagai pasar barang komoditas dan lahan investasi yang luas melalui kekayaan sumber daya alamnya. “Untuk itu dalam menyambut agenda-agenda G20, Indonesia perlu menyiapkan infrastruktur untuk menyokong program-program perekonomian global (perdagangan bebas, investasi international-red) dan merubah peraturan penanaman modal untuk menarik minat investor sebesar-besarnya,”. Imbuh Mahendra.

Selain terlibat dalam G20, Indonesia pada tahun 2015 juga akan menghadapi skema MEA (masyarakat ekonomi Asean), dimana batas kerja sama dan transaksi di bidang perekonomian lintas Negara menjadi lebih mudah. Namun jika Indonesia belum siap secara kemandirian ekonomi (industry nasional-red) serta kualitas sumber daya manusianya, maka Indonesia hanya akan menjadi Negara pasar bagi produk luar negeri dan menjadi Negara penyedia bahan mentah bagi kapitalisme international. (eksploitasi SDA-red). **(aRs)**